

## DAFTAR PUSTAKA

- Mansury, R. (1999). *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Pengetahuan Perpajakan.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marsuni, L. (2006). *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia (Edisi 2)*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Resmi Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Visi Media.
- Sakti, N. W. (2015). *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online*. Jakarta: Visi Media.
- Setiyaji G, H. A. (2005). Evaluasi Kinerja Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi* 10(no. 2), 1-13.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Informasi APBN 2021 Percepat Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*. Jakarta: Tim Kementerian Keuangan. Diakses tanggal 16 Februari 2022, dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan Tahunan 2020 Konsisten Mengoptimalkan Peluang di Masa Mendatang*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2 Oktober 2021, dari <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-10/Laporan%20Tahunan%20DJP%202020%20-%20Bahasa.pdf>

- Wicaksono, M. A. (2014). Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo). *Skripsi, Universitas Diponegoro*.
- Asdriani, Anisa. (2019). *Tinjauan atas Penerapan e-Filing dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kelapa Gading*. Tangerang Selatan: Jurusan Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Yudhapratama, A. I. (2020). *Tinjauan atas pelaksanaan e-Filing sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Klaten. Karya Tulis Tugas Akhir*. Tangerang: Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2014 tentang *Surat Pemberitahuan (SPT)*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2013 tentang *Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2018 tentang Tata Cara penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (e-Filing) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP)*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang *Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-P6/PJ/2018 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang *Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan*.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2019 tentang *Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018*.

Surat Edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang *Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui e-Filing*.